

FRAUD AWARENESS AND FRAUD DETECTION-PREVENTION METHODS IN THE INDONESIAN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR

Iftikar Arif Yuri¹, Maya Rizki Sari^{2*}

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Program Studi Akuntansi, STIE Mahaputra Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Corresponding Author: mayarizkisarii@gmail.com

ABSTRACT

Purpose - To identify the level of awareness of fraud and methods for detecting and preventing fraud in several private and public companies in Indonesia.

Research Method - This research uses a quantitative approach to examine these problems. In this study, the sample consisted of directors, managers/supervisors, accountants and employees including internal auditors from public and private sector organizations in several Indonesian companies, especially in Riau and West Sumatra Provinces. Data collection techniques used online-based using Google Form distributed to respondents.

Findings - Total of 34 respondents who filled out the questionnaire resulted in the findings of around 76% of employees and managers working in private and public companies being aware of fraud and important factor for companies to consider. Meanwhile, in terms of tools/steps in preventing and detecting fraud in their organization, they are Internal Audit (94.1%), background check of prospective employees (91.2%) and also the Internal Control System (91.2%) which is a mechanism perceived effectiveness by employees within the organization.

Implication - Gratification reports from workers, socialization of GCG understanding, if necessary cooperate with state financial transaction supervisors on suspicious transactions in the accounts of workers and workers' families. Moreover, providing understanding in the form of training and socialization about the dangers of fraud and fraud prevention efforts in their organization. Prevention and detection methods need to be developed in the organization.

Keywords: Fraud Awareness, Fraud Detection-Prevention Methods, Public Sector, Private Sector

JEL code: H83, L32

PENDAHULUAN

Setiap organisasi yang memproduksi barang atau organisasi yang memberikan jasa tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen. Melalui manajemen yang baik, semua sumber daya organisasi yang ada dapat direncanakan, diatur, diarahkan dan dipantau sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan cara yang tepat (Abbas *et al.*, 2020). Saat ini, organisasi sektor publik dan swasta di seluruh dunia menghadapi perubahan ekonomi yang pesat, seperti globalisasi, teknologi yang semakin berkembang, perubahan industri dan bisnis, risiko dan kompleksitas informasi dan manajemen data. Dengan perubahan ini, risiko yang ada termasuk risiko penipuan meningkat secara signifikan (Meyer, 2016). Oleh karena itu, organisasi menyadari perlunya mengadopsi metode deteksi dan pencegahan penipuan proaktif untuk mengurangi potensi risiko penipuan.

Sebuah survei yang dilakukan oleh PWC (2011) mengungkapkan bahwa 37% orang responden secara global mengatakan kecurangan itu terjadi pada perusahaan responden yang menjadi sampel, serta adanya kejahatan ekonomi yang terus-menerus mengancam bisnis dan

proses bisnis (Young, 2017). Sebanyak 59 negara yang di survei mengatakan setuju bahwa kejadian penipuan dan kasus yang dilaporkan tidak ada penurunan. Sehingga faktanya, berbagai cara baru penipuan terus bermunculan dengan hal-hal yang dianggap tidak pantas oleh regulator dan publik terus berkembang.

Survei KPMG (2013) menemukan bahwa pelaku *fraud* terbanyak berasal dari karyawan yang mencapai sekitar 50%. Para karyawan tersebut, termasuk di antara orang-orang yang bekerja bukan dibagian manajemen di sebuah organisasi. Di tahun 2009, kategori pelaku penipuan yaitu karyawan, sebaliknya mewakili sekitar 34%. Angka-angka ini mengkhawatirkan bagi pemerintah dan manajemen, karena terjadi peningkatan sebesar 16% pada tahun 2013 di organisasi publik dan swasta yang disurvei oleh KPMG (2013).

Kategori pelaku penipuan kedua adalah pelanggan, kemudian manajemen, dengan masing-masing kategori menyumbang sekitar 18%. Laporan tersebut juga merilis bahwa pencurian dana keluar adalah kategori penipuan tertinggi dengan jumlah 67% pada tahun 2013, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan survei tahun 2009 yaitu sebesar 57%. Sedangkan jumlah pencurian dana yang masuk adalah sebesar 34%. Secara khusus, jenis penipuan yang paling umum adalah pencurian dan penerimaan uang tunai (26%), diikuti oleh penipuan faktur (16%) dan pencurian persediaan (13%) (KPMG, 2013). Pemerintah dan pelaku bisnis sepakat bahwa bahwa penipuan, penyuapan dan korupsi adalah kebiasaan buruk bagi bisnis dan masyarakat. Tindakan tegas harus diambil untuk mengurangi perilaku tersebut (Ernst & Young, 2014).

Oleh karena itu, dengan berkembangnya jenis-jenis *fraud*, maka sudah seharusnya setiap organisasi khususnya organisasi yang bergerak di sektor publik dan swasta harus *aware* atas kebutuhan untuk memiliki metode pendeteksian dan pencegahan fraud yang terjadi di organisasi. Beberapa peristiwa dan penelitian yang telah disajikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kesadaran pegawai yang ada pada sektor swasta dan publik terhadap kecurangan yang terjadi di perusahaan responden yang menjadi sampel, serta untuk memeriksa penggunaan metode maupun teknologi untuk mendeteksi dan mencegah penipuan di perusahaan yang bermuara pada kinerja organisasi. Maka ketika produktifitas meningkat secara otomatis tujuan dari organisasi untuk mendapatkan laba juga akan meningkat (Silaen *et al.*, 2021).

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Fraud

Hall (2010) menyatakan *fraud* merupakan sikap yang menampilkan dari fakta material berupa representasi palsu yang dibuat oleh salah satu pihak pada pihak lainnya untuk menipu dan membujuk pihak lain agar dibenarkan dengan bergantung pada fakta yang merugikannya. Sesuai dengan SA 240, IAPI menyebutkan bahwa *fraud* adalah tindakan yang disengaja oleh seseorang atau beberapa orang dalam manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, serta karyawan atau pihak ketiga yang terlibat dalam penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum.

Menurut Apriliana dan Agustina (2017) terkait *fraud* laporan keuangan dalam audit didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan sebagai kesalahan penyajian yang disengaja, kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Hal ini harus diatasi dengan pengendalian internal yang merupakan seperangkat rencana organisasi, metode, dan tindakan yang dipilih oleh perusahaan untuk mengamankan aset, memverifikasi keakuratan, dan keandalan data akuntan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mematuhi pedoman manajemen yang telah ditentukan (Sari, 2018).

Berdasarkan hukum yang berlaku umum, tindakan *fraud* atau kecurangan terjadi ketika lima syarat berikut terpenuhi, diantaranya:

1. Representasi salah. Ada pernyataan salah atau tidak diungkapkan.
2. Fakta material. Fakta harus menjadi faktor penting dalam mendorong seseorang untuk bertindak.
3. Maksud. Ada niat untuk menipu atau mengetahui bahwa pernyataan seseorang salah.
4. Kepercayaan yang bisa dibenarkan. Penyajian yang keliru merupakan faktor penting yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan.
5. Kerusakan atau Kerugian. Kecurangan menyebabkan kerusakan atau kerugian terhadap korban kecurangan tersebut.

Penelitian Terdahulu

Siregar dan Tenoyo (2015) yang melakukan survei kesadaran penipuan sektor swasta di Indonesia menemukan mayoritas responden sekitar 82,1% setuju bahwa penipuan adalah masalah utama bagi bisnis di Indonesia dan bisnis memiliki tingkat kesadaran penipuan yang cukup. Kontrol internal yang buruk dan kurangnya nilai-nilai etika disebut sebagai alasan perusahaan berada pada risiko penipuan, dan kebijakan etika serta kode etik yang baik dipandang sebagai proses manajemen risiko penipuan yang diperlukan.

Kemudian survei yang dilakukan Othman *et al.* (2015) memperoleh hasil analisis yang menunjukkan 93% responden sadar akan perlunya pelaporan dan tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan. Dalam tiga tahun, 73% menyatakan setuju bahwa metode deteksi penipuan yang digunakan dalam organisasi telah meningkat. Meskipun kesadaran, tampaknya ada kurangnya pelatihan. Oleh karena itu, pengembangan metodologi pencegahan penipuan di kalangan pekerja sektor publik diperlukan karena dapat memberikan pemahaman yang baik tentang pencegahan dan deteksi penipuan.

Survei yang dilakukan oleh PWC (2011) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, mencegah dan mendeteksi penipuan di sektor publik disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah instrumen paling efektif untuk mendeteksi adanya penipuan, 36% jumlah responden yang ada memperingatkan adanya penipuan dengan metode ini. Othman *et al.* (2015) menemukan bahwa kemajuan teknologi telah menghasilkan teknik deteksi penipuan proaktif yang menganalisis data dan transaksi untuk mengisolasi gejala penipuan seperti tren, angka, dan anomali terkait lainnya.

KPMG (2013) melakukan survei penipuan di Malaysia dan menemukan bahwa 62% responden merasa bahwa penipuan adalah masalah besar bagi bisnis Malaysia dan 83% responden mengaku mengalami penipuan dalam organisasi mereka. Ada beberapa metode deteksi kecurangan yang paling umum digunakan, yaitu pengendalian internal yang baik, investigasi manajemen, dan tinjauan audit internal (29%).

Pada tahun 2006, KPMG (2006) di dalam Siregar & Tenoyo (2015) melakukan survei penipuan di India dan menemukan bahwa responden menganggap risiko penipuan tertinggi untuk sektor keuangan, dan sektor transportasi, ritel, konsumen dan makanan termasuk di antara area risiko penipuan yang lebih rendah. Kurangnya nilai-nilai etika disebut-sebut sebagai salah satu alasan utama terjadinya kecurangan dalam organisasi. Ini dengan jelas menunjukkan kebutuhan organisasi dan karyawannya untuk secara proaktif bergerak menuju penciptaan “tempat kerja yang lebih etis”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji masalah-masalah tersebut. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari direktur, manajer/supervisor, dan karyawan termasuk akuntan dan auditor internal dari organisasi sektor publik dan swasta di beberapa perusahaan Indonesia khususnya di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Daerah ini dipilih sebagai sampel dikarenakan perusahaan tersebut lebih mudah untuk dijangkau oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan berbasis online menggunakan *google form* dan

disebarkan ke responden. Teknik kuesioner survei ini dikembangkan berdasarkan KPMG (2013) dengan beberapa modifikasi sesuai penelitian Siregar dan Tenoyo (2015) yang terdiri dari 30 pertanyaan dan dibagi menjadi tiga bagian.

Bagian A tentang profil demografis responden. Di bagian B, responden ditanyai tentang tingkat kesadaran responden tentang terjadinya penipuan di organisasi mereka. Sedangkan bagian C mengacu pada alat/metode proaktif apa yang telah digunakan oleh organisasi untuk mendeteksi atau mencegah penipuan. Untuk Bagian B, didalam kuesioner nya menggunakan skala *Likert* lima poin yang dimulai dari '1' (sangat tidak setuju) sampai '5' (sangat setuju). Sedangkan pada bagian C, menggunakan teknik *yes no question*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Survei yang dilakukan di organisasi sektor publik dan swasta di beberapa perusahaan Indonesia khususnya di Provinsi Riau dan Sumatera Barat menggunakan teknik pengumpulan data berbasis online yaitu dengan pengumpulan *google form* yang disebarikan kepada responden. Setelah disebarikan, responden yang memberi tanggapan berjumlah 34 responden dari organisasi sektor publik dan swasta di beberapa perusahaan Indonesia khususnya di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. yang terdiri dari Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh, PT.Pertamina, PT.Indomarco Prismatama, PT. PER dan beberapa perusahaan lainnya.

Tabel 1. Organisasi Responden

Perusahaan / Organisasi Tempat Bekerja	Jumlah	Persentase
PT. Indomarco Prismatama Cabang Pekanbaru	18	53%
PT. Karya Satria Abadi	4	12%
PT. Pertamina (Persero)	1	3%
PT. Angkasa Pura Solusi	1	3%
PT. Permodalan Ekonomi Rakyat	4	12%
PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari	1	3%
PT. Bank Riau Kepri	1	3%
RSI Ibnu Sina Payakumbuh	4	12%

Tabel 2. Profil Demografis Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	28	82.40%
Wanita	6	17.60%
Usia	Jumlah	Persentase
< 30 Tahun	23	67.6%
31 - 40 Tahun	10	29.4%
41 - 60 Tahun	1	3.0%
Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA se-derajat	7	20.6%
Diploma	5	14.7%
S1	20	58.8%
S2	2	5.9%
S3		
Posisi/Jabatan	Jumlah	Persentase
Manajer / Supervisor	7	21%
Direktur	1	3%
Staff Karyawan	25	74%
HRD	1	3%

Tabel 1 menampilkan persentase dari perusahaan atau organisasi tempat responden bekerja. Sebanyak 53% responden yang mengisi kuesioner berasal dari PT.Indomarcu Primatama cabang Pekanbaru kemudian PT. PER, PT. Karya Satria Abadi dan RSI Ibnu Sina Payakumbuh memperlihatkan hasil dan persentase yang sama yaitu masing-masing sebesar 12%.

Tabel 2 menampilkan profil demografi responden. Total responden terdapat 28 Pria (82,4%) dan 6 Wanita (17,6%). Berdasarkan usia, rata-rata usia tertinggi adalah di bawah 30 tahun (67,6%) diikuti oleh usia 31-40 tahun (29,4%) dan di atas 40 tahun (3%). Sebagian besar responden adalah pemegang gelar sarjana (59%) diikuti oleh SMA sederajat sebesar (21%). Untuk posisi jabatan responden, komposisi terbesar pada masing-masing organisasi yaitu staff karyawan sebesar 74% diikuti manajer/supervisor dengan persentase 21%.

Tabel 3. Kesadaran *Fraud*: Distribusi Tanggapan

No	Pernyataan	STS (%)	TS (%)	KS (%)	S (%)	SS (%)
1.	<i>Fraud</i> (kecurangan) adalah perhatian utama bisnis di Indonesia		1 (2,9%)	6 (17,6%)	8 (23,5%)	19 (55,9%)
2.	Perusahaan/organisasi saya proaktif dalam menangani risiko penipuan		1 (2,9%)	7 (20,6%)	16 (47,1%)	10 (29,4%)
3.	Perusahaan/organisasi saya telah mengidentifikasi dan menyetujui kebijakan dewan direksi tentang bagaimana entitas akan mengelola risiko penipuan			7 (20,6%)	18 (52,9%)	9 (26,5%)
4.	Perusahaan/organisasi saya telah melakukan proses <i>risk assessment</i> (penilaian risiko) terhadap penipuan			9 (26,5%)	16 (47,1%)	9 (26,5%)
5.	Auditor internal telah mengambil prosedur yang diperlukan untuk mendeteksi kecurangan			7 (20,6%)	19 (55,9%)	8 (23,5%)
6.	Perusahaan/organisasi saya telah menggunakan sistem akuntansi atau sistem pengendalian internal untuk mencegah penipuan		2 (5,9%)	7 (20,6%)	18 (52,9%)	7 (20,6%)
7.	Perusahaan/organisasi saya telah menggunakan sistem akuntansi atau sistem pengendalian internal untuk mendeteksi penipuan		1 (2,9%)	9 (26,5%)	15 (44,1%)	9 (26,5%)
8.	Perusahaan/organisasi saya memiliki sistem untuk pelaporan atas kecurigaan penipuan, korupsi, atau pelanggaran		1 (2,9%)	8 (23,5%)	15 (44,1%)	10 (29,4%)
9.	Auditor eksternal bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan di perusahaan yang mereka audit	1 (2,9%)		11 (32,4%)	15 (44,1%)	7 (20,6%)
10.	Harus ada standar audit yang akan membuat auditor eksternal bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan kecurangan			3 (8,8%)	16 (47,1%)	15 (44,1%)
11.	Auditor eksternal harus melakukan prosedur tambahan dalam upaya mereka untuk mengungkap kecurangan		1 (2,9%)	8 (23,5%)	16 (47,1%)	9 (26,5%)

12.	Auditor eksternal harus menilai aktivitas departemen pengendalian internal terkait dengan deteksi kecurangan			8 (23,5%)	16 (47,1%)	10 (29,4%)
-----	--	--	--	--------------	---------------	---------------

Catatan: STS adalah Sangat Tidak Setuju, TS adalah Tidak Setuju, KS adalah Kurang Setuju, S adalah Setuju, dan SS adalah Sangat Setuju

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan tentang kesadaran akan *fraud* kepada responden. Distribusi serta tanggapan rata-rata ditabulasikan dalam Tabel 3. Secara total, 79,4% dari responden yang ada (total tanggapan untuk poin 4 dan 5) setuju bahwa penipuan adalah perhatian utama bisnis di Indonesia. Bagi perusahaan/organisasi mereka telah mengidentifikasi dan menyetujui kebijakan dewan direksi tentang bagaimana entitas akan mengelola risiko penipuan. Ini digambarkan setelah jumlah persentase sekitar 76,5% (total tanggapan untuk poin 4 dan 5).

Sebagian besar juga setuju bahwa perusahaan responden memiliki tingkat kesadaran penipuan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh lebih dari 50 persen atau setelah dikalkulasikan sekitar 76% responden yang memilih setuju dan sangat setuju untuk tiap-tiap pertanyaan yang diajukan tentang kesadaran akan *fraud* di organisasi responden yang menjadi sampel.

Tabel 4. Alat / Langkah untuk Pencegahan dan Pendeteksian Fraud

No	Tools To Detect or Prevent Fraud	Persentase %
1.	Sistem Penilaian Penipuan (<i>Fraud assessment system</i>)	85,3%
2.	Manajemen Risiko Penipuan (<i>Fraud risk management</i>)	76,5%
3.	Pemberitahuan oleh pihak ketiga (karyawan, pelanggan, vendor atau sumber anonim)	85,3%
4.	Secara Tidak Sengaja (<i>Accidental</i>)	58,8%
5.	Audit Internal	94,1%
6.	Sistem Pengendalian Internal	91,2%
7.	Audit Eksternal	88,2%
8.	Kontrol Teknologi Informasi (TI)	88,2%
9.	Audit Teknologi Informasi (TI)	61,8%
10.	Penggalian / Pengumpulan Informasi Penting (<i>Data Mining</i>)	76,5%
11.	Pemeriksaan latar belakang calon karyawan	91,2%
12.	Pemeriksaan acak pada <i>email</i> karyawan	64,7%
13.	Pemeriksaan acak atas data transaksi	64,7%

Tabel 4 memperlihatkan daftar teratas dari alat/langkah untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* di organisasi responden yang menjadi sampel adalah dengan audit internal (94,1%) dan juga sistem pengendalian internal (91,2%). Kemungkinan besar hasil ini didapatkan karena pada perusahaan-perusahaan ini sudah menerapkan prosedur dan kebijakan yang baik terkait sistem pengendalian internal dan juga audit internalnya. Langkah ini bisa diasumsikan bahwa tindakan *fraud* oleh sumberdaya manusia yang ada di perusahaan akan bisa dideteksi dan dicegah langsung apabila prosedur dan kebijakan internal dilakukan dan dimonitor secara berkala.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesadaran sumber daya manusia di sektor publik dan swasta terhadap kecurangan yang terjadi di organisasi serta memeriksa penggunaan metode maupun teknologi untuk mendeteksi dan mencegah penipuan di perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan publik dan swasta memiliki

tingkat kesadaran penipuan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh lebih dari 50% atau setelah dikalkulasikan sekitar 76% responden yang memilih setuju dan sangat setuju untuk tiap-tiap pertanyaan yang diajukan tentang kesadaran *fraud* di organisasi.

Sedangkan dalam hal alat/langkah dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* di organisasi/perusahaan yang diteliti adalah dengan audit internal (94,1%). Pemeriksaan latar belakang calon karyawan (91,2%) dan juga sistem pengendalian internal (91,2%) yang merupakan mekanisme efektif yang dirasakan oleh karyawan di dalam organisasi. Terdapat beberapa informasi tambahan didalam kuesioner sebagai saran dari responden untuk pencegahan dan deteksi penipuan di perusahaan/organisasi.

Berdasarkan tanggapan yang ada, berikut beberapa saran yang diberikan terkait pencegahan dan deteksi penipuan. Diantaranya:

1. Pelaporan gratifikasi dari pekerja
2. Sosialisasi pemahaman tata kelola perusahaan yang baik,
3. Bila diperlukan, perusahaan bekerja sama dengan pengawas transaksi keuangan negara terhadap transaksi yg mencurigakan di rekening pekerja dan keluarga pekerja.
4. Pemberian pemahaman dalam bentuk training maupun sosialisasi tentang bahaya *fraud* serta upaya pencegahan *fraud* di organisasi/perusahaan.

Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dan meneliti perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti belum bisa meneliti banyak sampel dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan akses yang cukup sulit dan keterbatasan waktu yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Agustina, Y., Sari, M. R., Ardiana, D. P. Y., Hartini, H., Maknunah, L. U., Moridu, I., Satmoko, N. D., Erwina, E., Pangarso, A., Saputra, A. H., Ramaditya, M., & Butarbutar, M. (2020). *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Publik Dan Bisnis. Widina Bhakti Persada Bandung*, 2020.
- Apriliana, S., & Agustina, L. (2017). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/jda.v7i1.4036>
- Hall, J. A. (2010). Information Technology Auditing and Assurance. In *Lecture Notes in Logistics*.
- KPMG. (2013). KPMG Malaysia Fraud, Bribery and Corruption Survey 2013. *KPMG Forensic*.
- Meyer, M. (2016). Global Automotive Executive Survey 2016. *KPMG International*, 1–52. <https://doi.org/132042>
- Othman, R., Aris, N. A., Mardziah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. (2015). Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions. *Procedia Economics and Finance*, 28. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01082-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01082-5)
- PWC. (2011). Fighting fraud in the public sector. *Pwc, June*.
- Sari, M. R. (2018). *Pengendalian Intern, Total Quality Management, dan Good Corporate Governance terhadap Peningkatan Kinerja Lembaga Amil Zakat di Kota Medan Pada Tahun 2012-2016*. Universitas Sumatera Utara.
- Silaen, N. R., Syamsuriansyah, S., Chairunnisah, R., Sari, M. R., Mahriani, E., Tanjung, R., Triwardhani, D., Haerany, A., Masyurroh, A., Satriawan, D. G., Lestari, A. S. I., Arifudin, O., Rialmi, Z., & Putra, S. (2021). Kinerja Karyawan. In *Widina Bhakti Persada Bandung. Widina Bhakti Persada Bandung*.

- Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 22(3). <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0016>
- Young, E. &. (2014). *Overcoming compliance fatigue Reinforcing the commitment to ethical growth: 13th Global Fraud Survey*.
- Young, E. &. (2017). Blockchain: How this technology could impact the CFO. *Ernst & Young LLP*.